



LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2022 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah, 


MOH. RIFANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Cascading Kinerja.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Isu – Isu Strategis	8
1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	8
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	8
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2022.....	22
3.1.2 Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	24
3.1.3 Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA.....	25
3.1.4 Realisasi Kinerja Sesuai Dengan Standar Nasional	25
3.1.5 Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kinerja	26
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27
3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	50
3.3 Inovasi	54
3.4 Penghargaan	54
Bab. IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	16
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	17
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	19
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	21
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPMPTS Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Survei IKM Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2022	24
Tabel 3.4	Pencapaian Target 5 Tahunan RENSTRA	25
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	28
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	28
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	29
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	30
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	31
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	31
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	32
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Program Promosi Penanaman Modal	33
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	34
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	34
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	35

Tabel 3.16	Realisasi Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal	36
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	37
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	38
Tabel 3.19	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	39
Tabel 3.20	Realisasi Indikator Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	41
Tabel 3.22	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	42
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	43
Tabel 3.24	Realisasi Indikator Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	44
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45
Tabel 3.26	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	45
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	46
Tabel 3.28	Realisasi Indikator Program pengelolaan data sistem informasi penanaman modal	47
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	48
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Program	51
Tabel 3.32	Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2022 berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai realisasi investasi PMDN/PMA, jumlah investor PMDN/PMA, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2022, realisasi investasi PMDN/PMA mencapai Rp. 111,18 Triliun, meningkat 160,4% dari realisasi investasi di tahun 2021. Jumlah investor berskala nasional meningkat 58% dari tahun 2021, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 meningkat 1,25% dari IKM tahun 2021, dengan hasil 98% (Sangat Baik).

Realisasi investasi di tahun 2022 juga dapat melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dengan target sebesar Rp. 53,09 Triliun, dan dapat dicapai 209,42% dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 111,18 Triliun. Selanjutnya DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat 2 (dua) penghargaan di tahun 2022, yaitu Layanan Investasi Terbaik ke-2 Kategori Provinsi pada Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM RI dan Mitra Assessment Ekonomi PDRB Terbaik Bank Indonesia Award Tahun 2022.

Total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp.17.998.081.043,- dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 72,80%. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.7.542.580.901, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.868.883.298,-, dan Belanja Modal Rp.586.616.844,-. Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp. 6.918.965.440,- (91,73%), Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 9.298.143.723,- (94,22%), dan Belanja Modal terealisasi

sebesar Rp. 568.576.859,- (96,92%). Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2022 dapat terealisasi sebesar Rp.16.785.686.022,- (93,26%).

Palu, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah, 

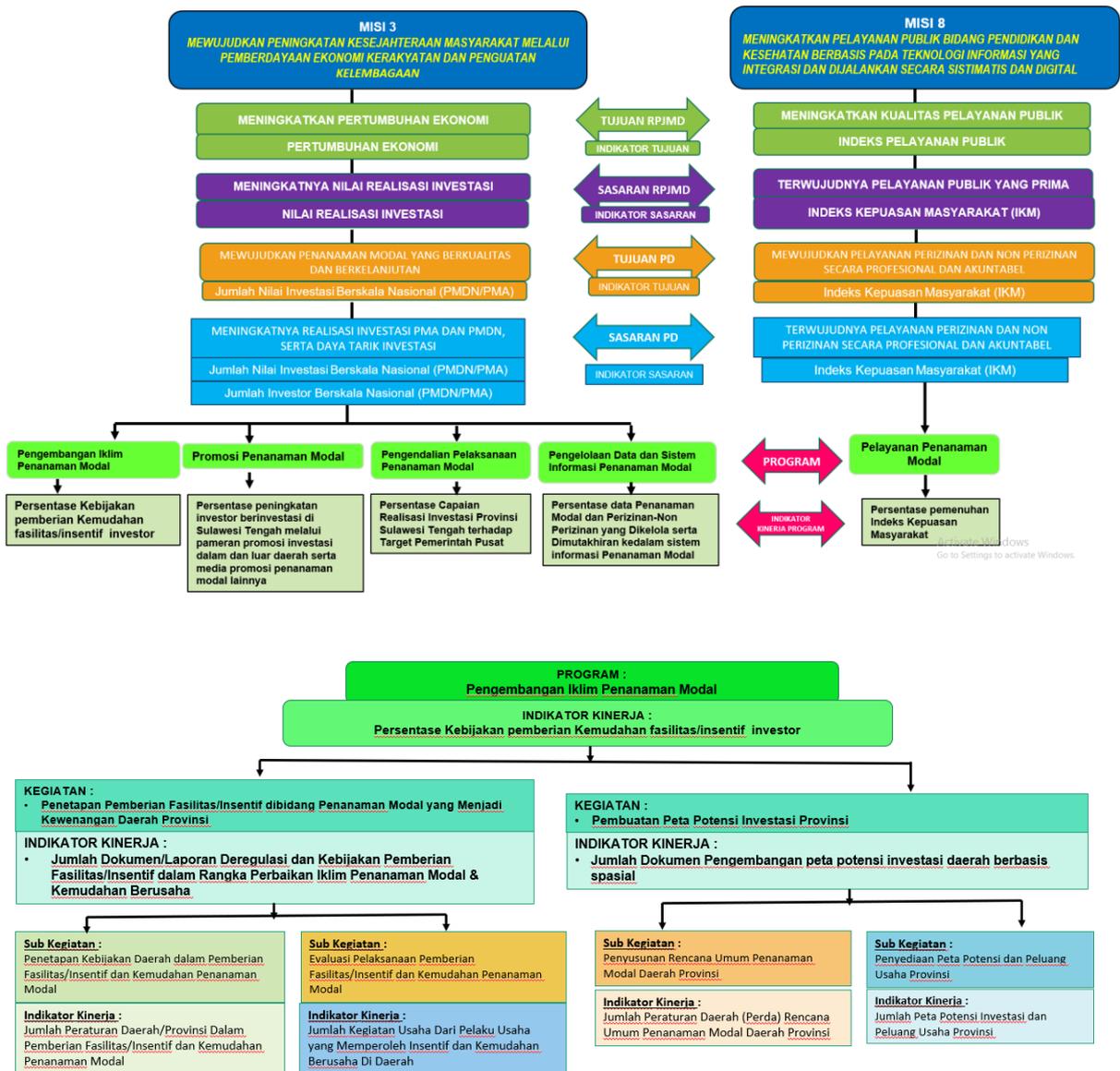


MOH. RIFANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

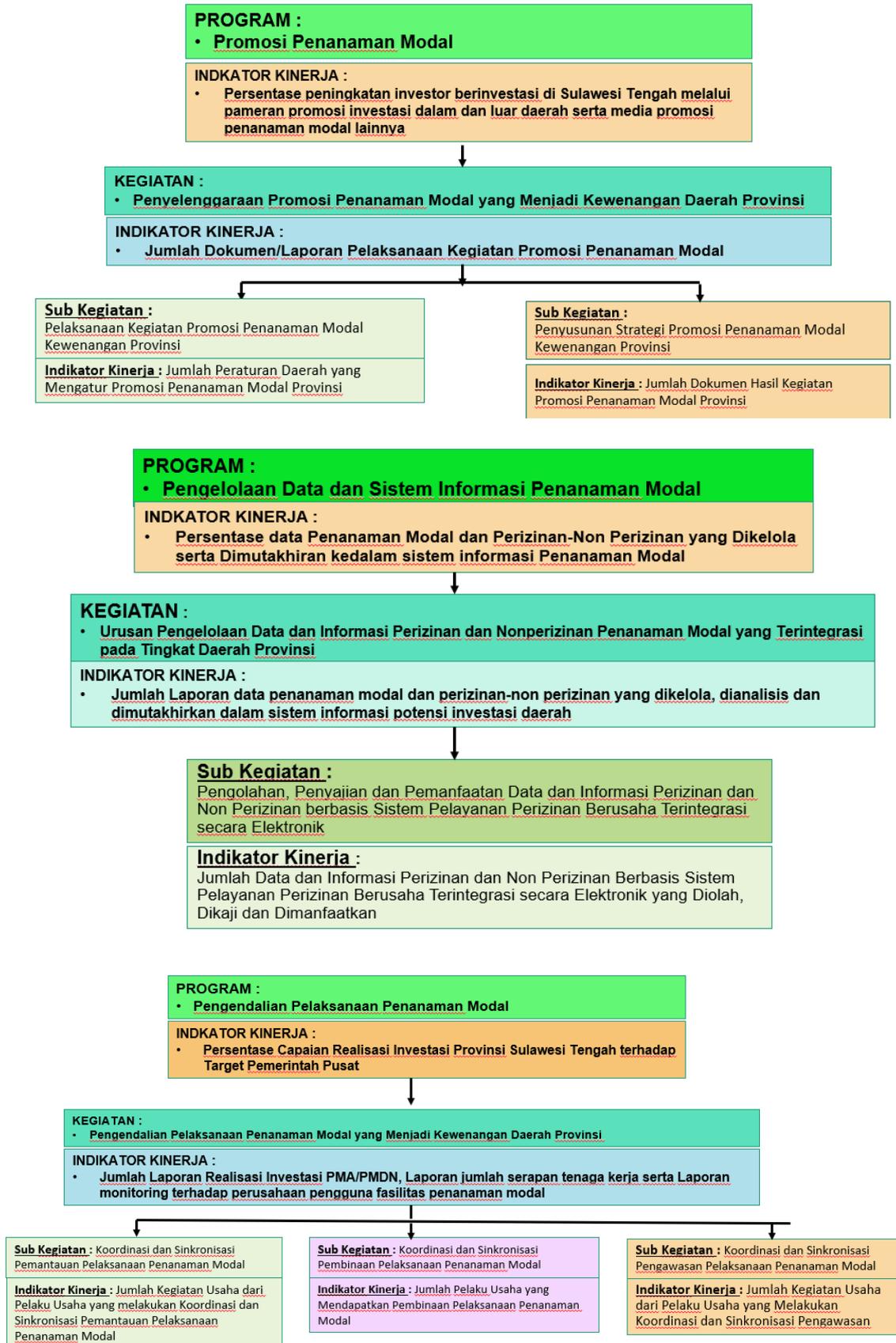
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

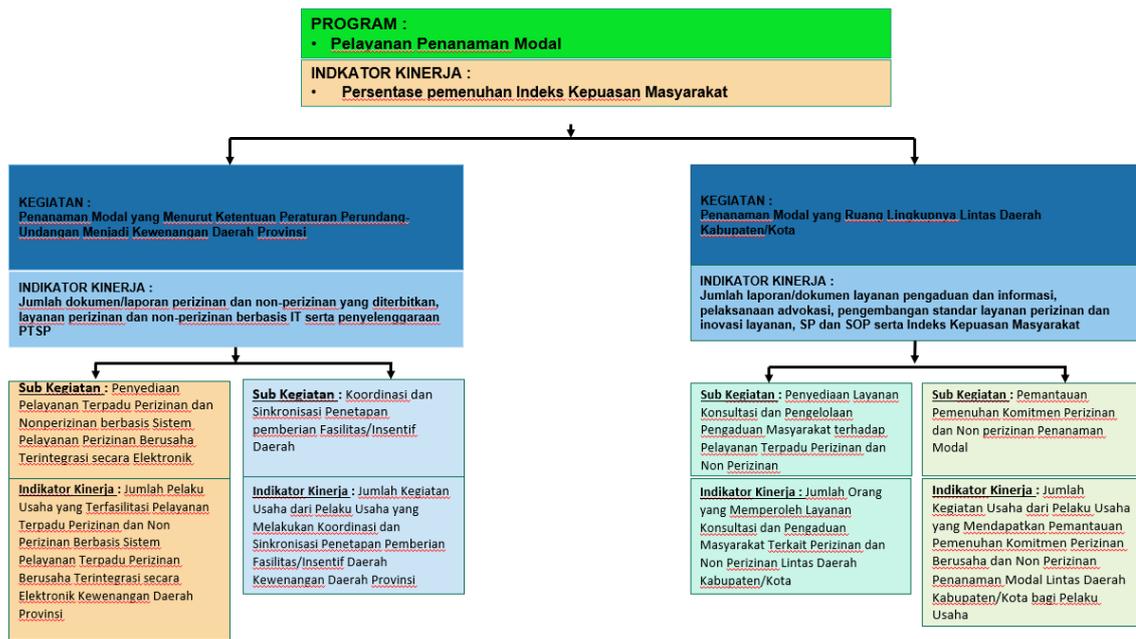
Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal, dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Cascading kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Cascading Kinerja



Gambar 1.1 Cascading Kinerja (Lanjutan)



Gambar 1.1 Cascading Kinerja (Lanjutan)

Gambar 1.1 menunjukkan penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja dari RPJMD ke Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Pada cascading kinerja tersebut dapat dilihat penjabaran misi Gubernur Sulawesi Tengah ke tujuan, sasaran, hingga ke tingkat sub kegiatan yang ada pada DPMPTSP Sulawesi Tengah. Dari cascading kinerja tersebut dapat dilihat keterkaitan capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam pencapaian misi Gubernur Sulawesi Tengah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

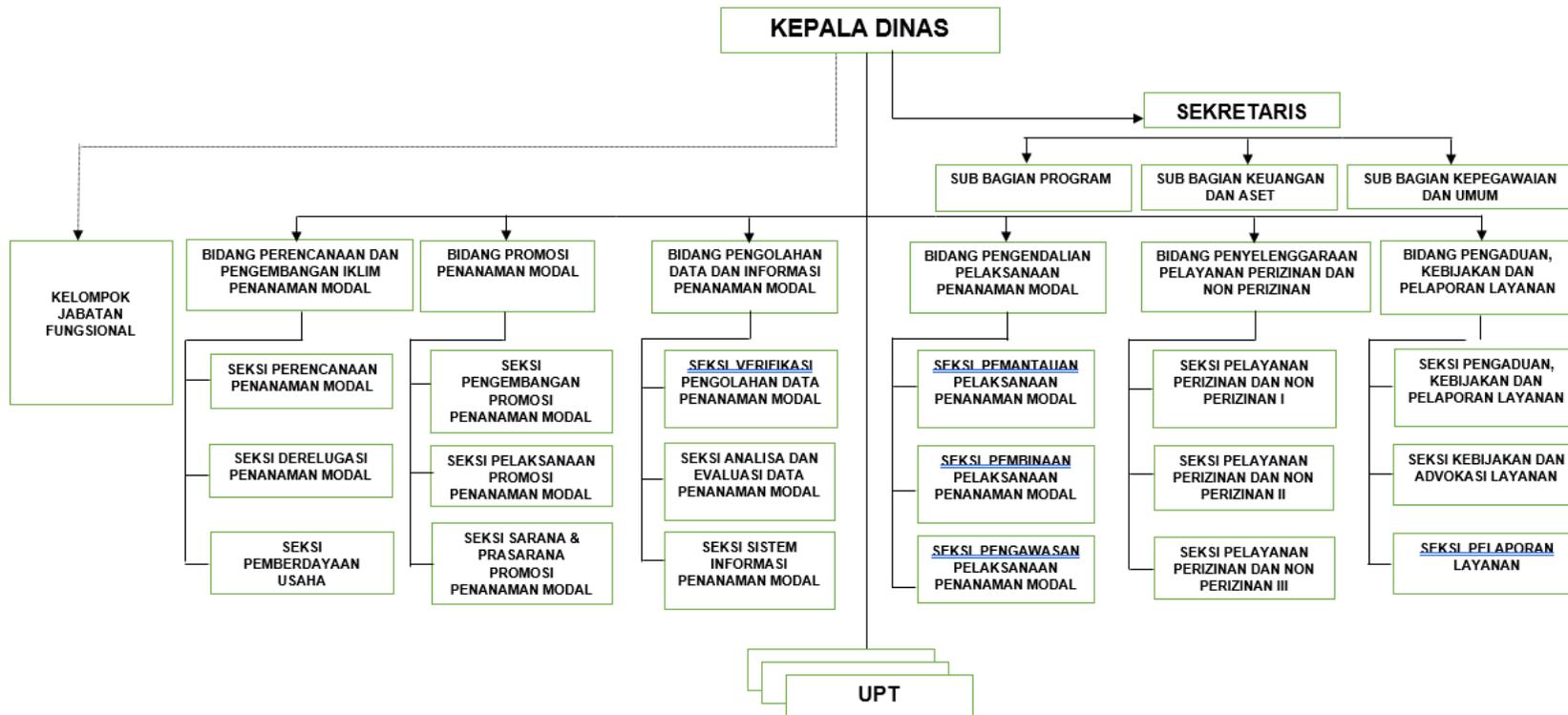
1. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya besaran Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 - Seksi Pemberdayaan Usaha
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Sarana Dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
 - Seksi Verifikasi Pengolahan Data Penanaman Modal
 - Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal
 - Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
 - Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
 - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
 - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II
 - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - Seksi Kebijakan Dan Advokasi Layanan
 - Seksi Pelaporan Layanan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

1.3 Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2022 tersebut sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum optimal.
3. Belum dapat melakukan pameran promosi investasi, disebabkan adanya Pandemic Covid-19
4. Sebagian kabupaten/kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah.
5. Sebagian kabupaten/kota belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal.
6. Sebagaimana kabupaten/kota untuk Regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia.
7. Kabupaten/kota belum seluruhnya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS.

1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi berdasarkan esselonering sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	7 Orang
Eselon IV	3 Orang
Staf	49 Orang
Honorar /Tenaga Kontrak	61 Orang
Jumlah	121 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 121 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 7 orang, Eselon IV berjumlah 3 orang, staf berjumlah 49 orang, dan tenaga kontrak/honorar berjumlah 61 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	5 Orang
Golongan III	37 Orang
Golongan IV	18 Orang
Non Golongan	61 Orang
Jumlah	121 Orang

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 18 orang Golongan IV, 37 orang Golongan III, 5 orang Golongan II, dan 61 orang Non Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	6 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Pejabat Fungsional	19 Orang
Jumlah	30 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 6 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 19 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D III	D I	SLTA	SMP	SD	Jumlah
0	22	67	3	0	29	0	0	121

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP yang berpendidikan S2 berjumlah 22 orang, S1 berjumlah 67 orang, DIII berjumlah 3 orang, dan SLTA berjumlah 29 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	7.627.582.454,00
3	Gedung dan Bangunan	23.091.050.056,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	410.142.650,00
5	Aset tetap lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	17.330.000,00
	Jumlah	32.721.513.660,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

a. Mobil Layanan Keliling (*Site Mobile Service*);

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selain melayani di dalam gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil layanan keliling (*Site Mobile Service*).

b. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik.

Saat ini DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah. (**Pergub No. 37 Tahun 2019 Tentang MPP**). Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Provinsi ke-dua di Indonesia setelah DKI yang

mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Menegur secara tertulis kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, agar maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan rekrutmen terhadap tenaga ahli dan memberikan pelatihan teknis terhadap tenaga Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan.
3. Mengusulkan standar biaya tersendiri untuk tenaga ahli pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
4. Mengusulkan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Keenam Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur).
5. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Kepala Bidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan koordinasi yang maksimal dalam melakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, sebagai berikut :

1. Telah dibuat teguran secara tertulis melalui surat Kepala DPMPTSP nomor 700/10.72/KEU/DPMPSTSP tanggal 28 Nopember 2022.

2. Telah dilakukan perekrutan tenaga ahli pendamping OSS (*Online Submission System*) dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan telah diberikan pelatihan teknis bagi tenaga ahli pendamping tersebut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/01.05A/BID.IV.DPMPTSP tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Pendamping Sistem Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.
3. Standar biaya untuk tenaga ahli pemantauan, pembinaan dan pengawasan mengikuti Standar Biaya Umum Tahun 2022.
4. Rekomendasi nomor 4 belum ditindak lanjuti karena adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 17 Tahun 2021. Sehingga Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Keenam Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum diusulkan karena menunggu perubahan aturan di atasnya.
5. Koordinasi antara Bidang Perizinan dan Bidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan pengawasan bersama terhadap pelaku usaha penanaman modal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi
2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	403	461	519	577	635
2	Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya;
3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
4. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
6. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas;
7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

VISI : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan Misi VIII : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1)	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	- Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi	- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan. - Menciptakan iklim investasi yang kondusif. - Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi. - Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	- Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya. - Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah. - Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website. - Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi. - Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas.
2)	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	- Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.	- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2022 DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2022	DPPA 2022	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	
		J U M L A H	3.750.768.810	4.830.161.297	1.079.392.487
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	254.398.650	575.983.625	321.584.975
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	118.999.250	125.280.250	6.281.000
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	88.999.500	88.999.275	(225)
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	29.999.750	36.280.975	6.281.225
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	135.399.400	450.703.375	315.303.975
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	41.199.800	191.369.950	150.170.150
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	94.199.600	259.333.425	165.133.825
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.169.999.785	1.677.258.210	507.258.425
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	1.169.999.785	1.677.258.210	507.258.425
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	56.199.450	56.199.200	(250)
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.113.800.335	1.621.059.010	507.258.675
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	932.572.200	957.572.200	25.000.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	932.572.200	957.572.200	25.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	84.399.650	88.234.800	3.835.150
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	73.400.000	204.581.625	131.181.625	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	774.772.550	664.755.775	(110.016.775)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	249.399.750	324.399.522	74.999.772	
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	249.399.750	324.399.522	74.999.772	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	249.399.750	324.399.522	74.999.772	

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Lanjutan)

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2022	DPPA 2022	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.144.398.425	1.294.947.740	150.549.315
		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.399.050	324.948.700	75.549.650
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	162.399.675	209.334.550	46.934.875
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	86.999.375	115.614.150	28.614.775
		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	894.999.375	969.999.040	74.999.665
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	844.999.750	919.999.515	74.999.765
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	49.999.625	49.999.525	(100)

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta daya tarik investasi. Sasaran kedua, Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2022 adalah Rp. 3.750.768.810,- dan bertambah sebesar Rp. 1.079.392.487,- menjadi Rp. 4.830.161297 pada anggaran perubahan 2022.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran, juga dilaksanakan 1 (satu) program pendukung. Program pendukung ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2022	DPPA 2022	Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	
	J U M L A H	11.428.752.233	13.167.919.746	1.739.167.513
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.428.752.233	13.167.919.746	1.739.167.513
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.862.875	740.479.125	359.616.250
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.836.600	344.319.600	212.483.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	54.649.650	82.986.400	28.336.750
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	47.732.375	66.013.875	18.281.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.276.700	76.149.250	22.872.550
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.367.550	171.010.000	77.642.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.707.963.788	7.862.953.726	154.989.938
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.455.000.463	7.455.000.901	438
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.800.000	106.800.000	6.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.060.975	23.321.625	6.260.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.959.375	180.251.875	102.292.500
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.457.300	29.557.300	12.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.685.675	68.022.025	28.336.350
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.389.150	127.606.825	39.217.675
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.389.150	127.606.825	39.217.675
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.111.175	451.639.175	177.528.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168.829.625	193.191.625	24.362.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.281.550	258.447.550	153.166.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.095.680	1.066.649.468	470.553.788
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.993.805	56.214.568	26.220.763
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.216.250	148.781.500	23.565.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.885.625	861.653.400	420.767.775

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2022	DPPA 2022	Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.671.750	599.536.844	246.865.094
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	73.371.000	73.371.000
	Pengadaan Mebel	0	63.564.844	63.564.844
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.671.750	462.601.000	109.929.250
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.465.625.815	1.553.377.583	87.751.768
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.408.372	373.868.275	- 43.540.097
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048.217.443	1.179.509.308	131.291.865
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.032.000	765.677.000	202.645.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.950.000	414.200.000	134.250.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.340.000	213.710.000	23.370.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.742.000	137.767.000	45.025.000

Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2022 yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp.11.428.752.233,- dan bertambah Rp.1.739.167.513,- menjadi Rp.13.167.919.746,- pada anggaran perubahan 2022.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala DPMPTSP disajikan dalam tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp33.750.000.000.000
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	403
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)

Perjanjian kinerja Tahun 2022 diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) (Rp.) : Rp. 33.750.000.000.000,-
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) : 403 Proyek
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Hasil survey IKM 93% (Sangat Baik)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2022

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPMPTS Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 33.750.000.000.000	Rp 111.182.495.630.000	329%
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	403	2910	722%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)	98% (Sangat Baik)	105%

Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 dari indikator nilai realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, serta indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target investasi pada Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp.33.750.000.000.000,-. Realisasi investasi melebihi target dengan capaian sebesar 329% atau senilai Rp.111.182.495.630.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMDN Rp. 3.758.566.800.000,-.
 - Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMA Rp. 107.423.928.828.635,-.
- Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi juga dapat dicapai dengan sangat baik. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2022, dari target 403 proyek realisasi proyek investasi sebanyak 2.910 dengan rincian 2.408 proyek PMDN dan 502 proyek PMA. Dengan demikian indikator jumlah investor yang berinvestasi dapat dicapai 722%.
- Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan DPMPTSP memberikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98%. Hal ini berarti kinerja unit pelayanan DPMPTSP berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena

berada dalam kisaran nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 88,31 – 100,00. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Survei IKM Tahun 2022

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
- U1 s/d U9	= Unsur-Unsur Pelayanan	U1	Persyaratan	3,890
- NRR	= Nilai Rata-Rata	U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,890
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Penyelesaian	3,900
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Biaya/Tarif	3,980
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,890
- NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi	U6	Kompetensi Pelaksana	3,940
	Jumlah Kuesioner yang terisi	U7	Perilaku Pelaksana	3,920
NRR tertimbang	= NRR per unsur x 0.071	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,950
per unsur		U9	Sarana dan Prasarana	3,990
IKM UNIT PELAYANAN :			98,00	
Mutu Pelayanan :				
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)		88,31 - 100,00	
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)		76,61 - 88,30	
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)		65,00 - 76,60	
D (Tidak Baik)	: (1,00 - 0,5996)		25,00 - 64,99	

3.1.2 Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	% Peningkatan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 42.696.623.780.000	Rp 111.182.495.630.000	160,4%
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	1842	2910	58,0%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,75%	98%	1,25%

Capaian indikator kinerja DPMPTSP tahun 2022 melebihi capaian tahun 2021. Nilai realisasi investasi pada tahun 2022 meningkat 160,4% dari nilai realisasi yang dicapai di tahun 2021. Jumlah proyek investor berskala nasional juga meningkat sebesar 58%. Sementara untuk hasil survey

kepuasan masyarakat pada tahun 2022 meningkat 1,25% dari hasil IKM tahun 2021 dengan predikat SANGAT BAIK.

3.1.3 Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Perbandingan pencapaian target indikator kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Target 5 Tahunan RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 5 Tahunan (2021-2026)	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Sampai Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 188.750.000.000.000	Rp 111.182.495.630.000	Rp 111.182.495.630.000	58,9%
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2595	2.910	2.910	112,1%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97% (Sangat Baik)	98% (Sangat Baik)	98% (Sangat Baik)	101%

Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa realisasi investasi sampai pada tahun 2022 telah mencapai 58,9% dari target RENSTRA. Jumlah proyek investor berskala nasional pada tahun 2022 telah melampaui target 5 tahunan dengan capaian 112,1% dari target RENSTRA. Kualitas pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik.

3.1.4 Realisasi Kinerja Sesuai Dengan Standar Nasional

Pada tahun 2022 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar yaitu Rp. 53,09 Triliun. Target tersebut dapat dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP dengan jumlah realisasi investasi sebesar Rp.111,18 Triliun atau 209,42% dari target realisasi BKPM RI.

3.1.5 Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah :

1. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
2. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja.
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam rangka mengurangi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah-langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama pada jajaran pemerintah daerah dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

4. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta merencanakan pengadaan sarana pendukung lainnya di tahun berikutnya.
6. Pemanfaatan secara maksimal Mal Pelayanan Publik.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2022.

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yang strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi. Indikator dari program ini yaitu persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor.

Realisasi Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya Tarik investasi	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor	90%	95%	106%	575.983.625	556.080.994	97%

Indikator program ini mempunyai target 90%, dan realisasinya 95%. Sehingga capaian indikator program ini 106%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 575.983.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 556.080.994,- atau 97%.

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha	1 dok/lap	1 dok/lap	100%	125.280.250	122.483.800	98%

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan 100% dengan keluaran berupa 1 (satu) laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 125.280.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.483.800,- atau 98%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mempunyai indikator kinerja yaitu Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Realisasi indikator sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dok	1 dok	100%	88.999.275	88.312.825	99%

Sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan RAPERGUB Sulawesi Tengah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.88.999.275,- dengan realisasi Rp.88.312.825,- atau 99%.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Realisasi indikator sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	100%	36.280.975	34.170.975	94%

Target indikator sub kegiatan ini dapat direalisasikan 100%, dimana dalam sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 36.280.975,- dengan realisasi Rp. 34.170.975,- atau 94%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kegiatan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial	1 dok	1 dok	100%	450.703.375	433.597.194	96%

Target kegiatan ini dapat dicapai 100%, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dihasilkan 1 (satu) dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 450.703.375,- dengan realisasi Rp. 433.597.194,- atau 96%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mempunyai indikator yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi. Realisasi indikator sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dok	1 dok	100%	191.369.950	187.799.950	98%

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan Perencanaan Kawasan

Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.191.369.950,- dengan realisasi Rp. 187.799.950,- atau 98%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi. Realisasi indikator sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sub Kegiatan
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dok	1 dok	100%	259.333.425	245.797.244	95%

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Evaluasi Kemitraan Usaha antara UMKM dan Investor kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.259.333.425,- dengan realisasi Rp. 245.797.244,- atau 95%.

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal adalah program yang mengkaji dan menghasilkan pemahaman yang sinergi serta peningkatan kualitas dalam melakukan promosi penanaman modal. Program ini mempunyai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator yaitu persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman

modal lainnya. Realisasi indikator Program Promosi Penanaman Modal dapat dilihat pada table Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya Tarik investasi	Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya	51%	370%	725%	1.677.258.210	1.466.256.161	87%

Pada tahun 2022 tercatat jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan sebanyak 17.156. Jumlah ini meningkat sangat signifikan dibandingkan NIB yang terbit di tahun 2021 sebanyak 3.650. Dari target 51% peningkatan investor yang berinvestasi di Sulawesi Tengah dapat direalisasikan sebesar 370%. Artinya terdapat peningkatan sebesar 370% investor yang berinvestasi di Sulawesi Tengah dari tahun 2021. Dengan demikian indikator program Promosi Penanaman Modal dapat dicapai sebesar 725%.

Pagu anggaran program ini pada T.A. 2022 Rp. 1.677.258.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.466.256.161,- atau 87%.

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki Indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 dok/lap	1 dok/lap	100%	1.677.258.210	1.466.256.161	87%

Target indikator kegiatan yaitu 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 1.677.258.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.466.256.161,- atau 87%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi. Kemudian. Realisasi indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dok	1 dok	100%	56.199.200	56.198.650	99,99%

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 berupa pendampingan pembuatan video potensi unggulan di kabupaten Morowali Utara, Parigi

Moutong, dan Tojo Una-Una. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2022 sebesar Rp. 56.199.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.198.650,- atau 99,99%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah mengikuti dan melaksanakan pameran dalam dan luar daerah yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pameran. Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi. Realisasi indikator kinerja sub kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Sub Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dok	1 dok	100%	1.621.059.010	1.410.057.511	87%

Event pameran luar daerah yang diikuti DPMPTSP selama tahun 2022 yaitu Kassel Expo, Batu Malang Tourism and Trade Investmen Expo (BTTIE), dan Jakarta Fair Kemayoran. Untuk event dalam daerah yang diikuti yaitu Festival Danau Poso. Selain itu, DPMPTSP juga berpartisipasi dalam event luar negeri pada Dubai Expo 2022. Target indikator sub kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 1.621.059.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.410.057.511,- atau 87%.

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dan perizinan penanaman modal. Sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel. Indikator program ini adalah Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat. Realisasi indikator kinerja program ini dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Indikator Program
Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	98%	105%	1.294.947.740	1.241.253.273	96%

Program ini mempunyai target indikator persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93%. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan DPMPTSP pada tahun 2022 memberikan hasil IKM 98%, sehingga capaian indikator program ini adalah 105%.

Pagu anggaran program ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 1.294.947.740,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.241.253.273,- atau 96%.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks

Kepuasan Masyarakat. Realisasi indikator kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dok/lap	1 dok/lap	100%	324.948.700	291.829.888	90%

Target indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 (satu) dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 324.948.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 291.829.888,- atau 90%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

a. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan

non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha. Realisasi indikator sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha	500 kegiatan usaha	1978 kegiatan usaha	396%	209.334.550	188.537.738	90%

Sub kegiatan ini memiliki target 500 kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota, dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebanyak 1.978 kegiatan usaha. Sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 396%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.209.334.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 188.537.738,- atau 90%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan dan layanan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Realisasi indikator sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota	7 orang/ perusahaan	4 orang/ perusahaan	143%	209.334.550	188.537.738	90%

Target indikator sub kegiatan yaitu 7 orang atau perusahaan yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Dalam realisasinya hanya 4 orang atau perusahaan yang mengajukan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan semakin baik sehingga semakin sedikit pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan demikian target indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan capaian 143%.

Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A. 2022 sebesar Rp. 115.614.150,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 103.292.150,- atau 89%.

2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Realisasi indikator kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP	1 dok/lap	1 dok/lap	100%	969.999.040	949.423.385	98%

Target indikator kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 969.999.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 949.423.385,- atau 98%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis IT, diantaranya dengan melaksanakan workshop OSS bagi pelaku usaha UMK dan Non UMK. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi. Realisasi Indikator sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	500 pelaku usaha	3.411 pelaku usaha	682%	919.999.515	902.691.740	98%

Target indikator sub kegiatan ini adalah 500 pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Target ini dapat terealisasi dengan jumlah pelaku usaha yang mendapat layanan sebanyak 3.411 pelaku usaha, sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 682%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2022 sebesar Rp. 919.999.515,- dengan realisasi sebesar Rp. 902.691.740,- atau 98%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi. Realisasi indikator sub kegiatan ini dapat dilihat dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	271 kegiatan usaha	17.156 kegiatan usaha	6331%	49.999.525	46.731.645	93%

Target indikator sub kegiatan ini adalah 271 kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target ini dapat terealisasi sebanyak 17.156 kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini yaitu 6.331%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.49.999.525,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.731.645,- atau 93%.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator program yaitu Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat. Realisasi target indikator program dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Realisasi Indikator
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya Tarik investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat	100%	209%	209%	957.572.200	931.277.523	97%

Target indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100% mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi (BKPM) menetapkan target realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 53,09 Triliun. target ini dapat dicapai dengan realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp. 111,18 Triliun. Sehingga capaian indikator program adalah 209%.

Pagu anggaran program pada T.A. 2022 sebesar Rp. 957.572.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 931.277.523,- atau 97%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Provinsi	Jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal	1 laporan	1 laporan	100%	957.572.200	931.277.523	97%

Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Provinsi yaitu 1 (satu) laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal. Jumlah realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 adalah Rp.111,18 Triliun dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang terserap sebanyak 40.959 orang. Capaian indikator kegiatan adalah 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar sebesar Rp. 957.572.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 931.277.523,- atau 97%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Realisasi Indikator Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	4 kegiatan usaha	4 kegiatan usaha	100%	88.234.800	87.934.800	99,7%

Target indikator sub kegiatan ini adalah 4 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2022 sebesar Rp. 88.234.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.934.800,- atau 99,7%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengaawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	161 pelaku usaha	161 pelaku usaha	100%	204.581.625	201.011.948	98%

Target indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 161 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.204.581.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.011.948,- atau 98%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	321 kegiatan usaha	321 kegiatan usaha	100%	664.755.775	642.330.775	97%

Target indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 321 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp.664.755.775,- dengan realisasi sebesar Rp. 642.330.775,- atau 97%.

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah program yang menyediakan data laporan penanaman modal dan data

perizinan non perizinan beserta informasi penanaman modal. Sasarannya adalah Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini memiliki indikator yaitu persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal. Realisasi indikator program dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Realisasi Indikator

Program pengelolaan data sistem informasi penanaman modal

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya Tarik investasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal	90%	95%	106%	324.399.522	290.518.292	90%

Indikator program ini menargetkan sebanyak 90% data penanaman modal dan perizinan-non perizinan dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal. Data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 95%, sehingga capaian indikator program ini adalah 106%.

Pagu anggaran program pada T.A. 2022 sebesar Rp. 324.399.522,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.518.292,- atau 90%.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Realisasi indikator kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Realisasi Indikator Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah	1 laporan	1 laporan	100%	324.399.522	290.518.292	90%

Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Potensi Investasi Regional (PIR) untuk mendukung capaian indikator kegiatan. Sebagai hasilnya disusun 1 (satu) laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2022 sebesar Rp. 324.399.522,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.518.292,- atau 90%.

Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (*updating*) data investasi. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. Realisasi indikator sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pengukuran Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Capaian
Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	324.399.522	290.518.292	90%

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 1 (satu) dokumen yang berisi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2022. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini adalah 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2022 sebesar Rp. 324.399.522,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.518.292,- atau 90%.

3.2 EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 program. Sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sementara sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 dapat dilihat pada Tabel 3.31 sebagai berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Program

Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran		Capaian Kinerja x Pagu Anggaran (5 x 6)	8 - 7
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor	90%	95%	106%	575.983.625	556.080.994	607.982.715	51.901.721
	Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya	51%	370%	725%	1.677.258.210	1.466.256.161	12.168.343.876	10.702.087.715
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat	100%	209%	209%	957.572.200	931.277.523	2.005.373.271	1.074.095.748
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal	90%	95%	106%	324.399.522	290.518.292	342.421.718	51.903.426
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	98%	105%	1.294.947.740	1.241.253.273	1.364.568.586	123.315.313
TOTAL								16.488.690.166	12.003.303.923

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.31, maka diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah 72,80%.

Secara keseluruhan, total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp.17.998.081.043,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.7.542.580.901, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.868.883.298,-, dan Belanja Modal Rp.586.616.844,-. Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp. 6.918.965.440,- (91,73%), Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 9.298.143.723,- (94,22%), dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 568.576.859,- (96,92%). Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2022 dapat terealisasi sebesar Rp.16.785.686.022,- (93,26%). Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3.32 Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022

No.	URAIAN	TOTAL PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SILPA	
			Rp.	%	%	Rp.	%
		17.998.081.043	16.785.686.022	93,26%	100%	1.212.395.021	6,74%
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.167.919.746	12.300.299.779	93,41%	100%	867.619.967	6,59%
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.479.125	709.228.561	95,78%	100%	31.250.564	4,22%
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	344.319.600	329.996.111	95,84%	100%	14.323.489	4,16%
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.986.400	82.926.400	99,93%	100%	60.000	0,07%
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	66.013.875	65.848.800	99,75%	100%	165.075	0,25%
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.149.250	76.034.250	99,85%	100%	115.000	0,15%
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.010.000	154.423.000	90,30%	100%	16.587.000	9,70%
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.862.953.726	7.228.474.721	91,93%	100%	634.479.005	8,07%
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.455.000.901	6.831.385.440	91,63%	100%	623.615.461	8,37%
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.800.000	101.800.000	95,32%	100%	5.000.000	4,68%
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.321.625	23.285.250		100%	36.375	0,16%
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	180.251.875	177.094.256	98,25%	100%	3.157.619	1,75%
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29.557.300	29.541.200		100%	16.100	0,05%
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.022.025	65.368.575	96,10%	100%	2.653.450	3,90%
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.606.825	127.382.775	99,82%	100%	224.050	0,18%
2.18.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.606.825	127.382.775	99,82%	100%	224.050	0,18%
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	451.639.175	435.543.675	96,44%	100%	16.095.500	3,56%
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	193.191.625	190.253.475	98,48%	100%	2.938.150	1,52%
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.447.550	245.290.200	94,91%	100%	13.157.350	5,09%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.066.649.468	938.838.222	88,02%	100%	127.811.246	11,98%
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.214.568	53.522.470	95,21%	100%	2.692.098	4,79%
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.781.500	147.813.535	99,35%	100%	967.965	0,65%
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	861.653.400	737.502.217	85,59%	100%	124.151.183	14,41%
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.536.844	581.496.859	96,99%	100%	18.039.985	3,01%
2.18.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.371.000	73.000.000	99,49%	100%	371.000	0,51%
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	63.564.844	57.646.000	90,69%	100%	5.918.844	9,31%
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.601.000	450.850.859	97,46%	100%	11.750.141	2,54%
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.553.377.583	1.519.935.586	97,85%	100%	33.441.997	2,15%
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373.868.275	367.873.256	98,40%	100%	5.995.019	1,60%
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.179.509.308	1.152.062.330	97,67%	100%	27.446.978	2,33%
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	765.677.000	759.399.380	99,18%	100%	6.277.620	0,82%
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	414.200.000	413.404.880	99,81%	100%	795.120	0,19%
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.710.000	212.607.000	99,48%	100%	1.103.000	0,52%
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.767.000	133.387.500	96,82%	100%	4.379.500	3,18%

Tabel 3.32 Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022
(Lanjutan)

No.	URAIAN	TOTAL PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SILPA	
			Rp.	%	%	Rp.	%
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	575.983.625	556.080.994	96,54%	100%	19.902.631	3,46%
02.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di	125.280.250	122.483.800	97,77%	100%	2.796.450	2,23%
02.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam	88.999.275	88.312.825	99,23%	100%	686.450	0,77%
02.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.280.975	34.170.975	94,18%	100%	2.110.000	5,82%
02.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	450.703.375	433.597.194	96,20%	100%	17.106.181	3,80%
02.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman	191.369.950	187.799.950	98,13%	100%	3.570.000	1,87%
02.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	259.333.425	245.797.244	94,78%	100%	13.536.181	5,22%
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.677.258.210	1.466.256.161	87,42%	100%	211.002.049	12,58%
02.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	1.677.258.210	1.466.256.161	87,42%	100%	211.002.049	12,58%
02.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	56.199.200	56.198.650	100,00%	100%	550	0,00%
02.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.621.059.010	1.410.057.511	99,93%	100%	211.001.499	13,02%
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	957.572.200	931.277.523	97,25%	100%	26.294.677	2,75%
02.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	957.572.200	931.277.523	97,25%	100%	26.294.677	2,75%
02.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88.234.800	87.934.800	99,66%	100%	300.000	0,34%
02.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204.581.625	201.011.948	98,26%	100%	3.569.677	1,74%
02.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	664.755.775	642.330.775	96,63%	100%	22.425.000	3,37%
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	324.399.522	290.518.292	89,56%	100%	33.881.230	10,44%
02.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi	324.399.522	290.518.292	89,56%	100%	33.881.230	10,44%
02.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non	324.399.522	290.518.292	89,56%	100%	33.881.230	10,44%
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.294.947.740	1.241.253.273	95,85%	100%	53.694.467	4,15%
02.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya	324.948.700	291.829.888	89,81%	100%	33.118.812	10,19%
02.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	209.334.550	188.537.738	90,07%	100%	20.796.812	9,93%
02.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	115.614.150	103.292.150	89,34%	100%	12.322.000	10,66%
02.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan	969.999.040	949.423.385	97,88%	100%	20.575.655	2,12%
02.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	919.999.515	902.691.740	98,12%	100%	17.307.775	1,88%
02.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	49.999.525	46.731.645	93,46%	100%	3.267.880	6,54%

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.212.395.021,- atau 6,74% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan Penghasilan sebesar Rp.623.615.461,- (3,46%).
2. Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 570.739.575,- (3,17%).
3. Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 18.039.985,- (0,10%).

3.3 INOVASI

Pada tahun 2022 tidak ada inovasi baru yang dikembangkan. Hal yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam bekerja.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP yang diperoleh pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Layanan Investasi Terbaik ke-2 Kategori Provinsi pada Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM RI
2. Mitra Assessment Ekonomi PDRB Terbaik Bank Indonesia Award Tahun 2022

BAB IV

PE N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2022 dapat dicapai dengan baik, dengan capaian melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Realisasi investasi di tahun 2022 mencapai Rp. 111,18 Triliun atau 329% dari total target Rp. 33,75 Triliun.
3. Jumlah investor berskala nasional tahun 2022 adalah 2.910 proyek, dengan rincian 2.408 proyek PMDN dan 502 proyek PMA. Capaian target indikator adalah 722%.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dicapai 98% dengan predikat Sangat Baik.
5. Target realisasi investai yang ditetapkan oleh BKPM RI pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 53,09 Triliun, dan dapat dicapai 209,42% dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 111,18 Triliun.
6. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah 72,80%.
7. Realisasi keuangan tahun 2022 adalah Rp.16.785.686.022,- (93,26%). dan realisasi fisik 100%.
8. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2022 sebanyak 2 (dua) yaitu Layanan Investasi Terbaik ke-2 Kategori Provinsi pada Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM RI dan Mitra Assessment Ekonomi PDRB Terbaik Bank Indonesia Award Tahun 2022.

4.2 Saran

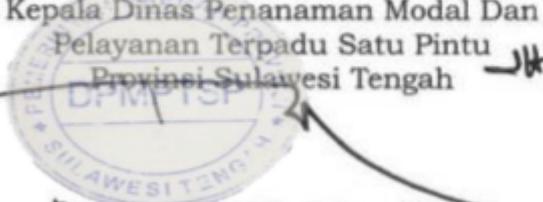
Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan rencana kinerja di tahun yang akan datang antara lain sebagai

berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2022 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710423 200003 1 002

L A M P I R A N

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

Palu, 25 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Usaha Muda
Nip. 19710412000031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.) - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Rp 33.750.000.000.000 403 Proyek
3	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 254.398.650,00	APBD
2	Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.169.999.785,00	
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 932.572.200,00	
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 249.399.750,00	
5	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.144.398.425,00	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.750.768.810,00	


 Gubernur Sulawesi Tengah

H. RUSDY MASTURA

Palu, 25 Februari 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710423 200003 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 13 Mei, 2022
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASRAB, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 11 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Drs. ASRAB, M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19660602 198603 1 013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	- Persentase Kebijakan pemberian Kemudahan fasilitas/insentif investor	90%

PROGRAM

1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN Rp. 254.398.650

ANGGARAN Rp. 254.398.650

KETERANGAN APBD

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sumbawa Tengah



Palu, 11 Februari 2022

Kepala Bidang
 Perencanaan & Pengembangan Iklim PM

Drs. ASRAB, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19660602 198603 1013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 11 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690320 200003 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal	- Persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya	51%

PROGRAM

1 Promosi Penanaman Modal

TOTAL ANGGARAN

TOTAL ANGGARAN

KETERANGAN

APBD

ANGGARAN

Rp. 1.169.999.785

Rp. 1.169.999.785

Rp. 1.169.999.785

Palu, 11 Februari 2022

Kepala Bidang
Promosi Penanaman Modal



Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19690320 200003 2 003

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710423 200003 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ISRAH ISMAIL, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Dra. ISRAH ISMAIL, MM
Pembina Tingkat I
Nip. 19641224 199403 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Penanaman Modal dan Perizinan-Non Perizinan serta Pemutakhiran Sistem Informasi Penanaman Modal	- Persentase data Penanaman Modal dan Perizinan-Non Perizinan yang Dikelola serta Dimutakhirkan kedalam sistem Informasi Penanaman Modal	90%

PROGRAM

1 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

ANGGARAN

Rp. 249.399.750

KETERANGAN

APBD

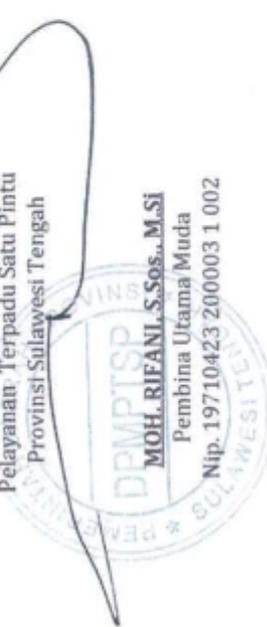
TOTAL ANGGARAN

Rp. 249.399.750

Palu, 11 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang
 Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19710423 200003 1 002

Dra. ISRAH ISMAIL, MM
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19641224 199403 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUS MG. ABD KARIM, SH. M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Palu, 13 Mei 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

FIRDAUS MG. ABD KARIM, SH. M.Si

Pembina Tkt.I
Nip. 19760626 200112 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	- Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat	100%

PROGRAM

1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KETERANGAN

APBD

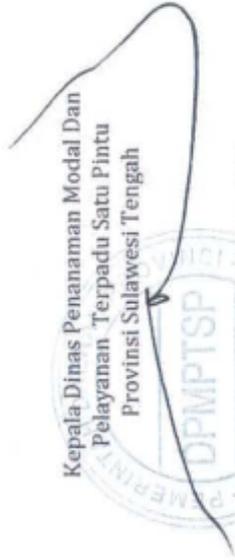
ANGGARAN

Rp. 932.572.200

TOTAL ANGGARAN

Rp. 932.572.200

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19710423 200003 1 002



Patu, 13 MEI 2022
 Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM



FIRDANS MG ABD KARIM, SH., M.Si
 Pembina Tk.1
 Nip. 19760626 200112 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 11 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN


ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19741028 200112 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan	- Persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	93%

PROGRAM

- 1 Pelayanan Penanaman Modal

ANGGARAN KETERANGAN
 Rp. 894.999.375 APBD

TOTAL ANGGARAN

Rp. 894.999.375

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 11 Februari 2022
 Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
 Non Perizinan

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19710423 200003 1 002



[Handwritten Signature]

ROHANA IUSUF DIAFARA, SH
 Penata Tingkat I
 Nip. 19741028 200112 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKA, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 11 Februari 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL

SISKA, S.Sos, M.Si

Pembina Tkt. I
Nip. 19671107 198903 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan	- Persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	93%

PROGRAM

1 Pelayanan Penanaman Modal

ANGGARAN

Rp. 249.399.050

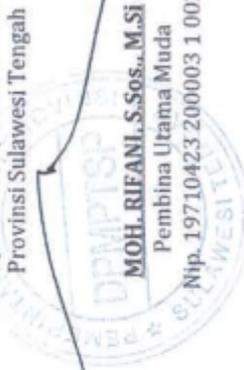
KETERANGAN

APBD

TOTAL ANGGARAN

Rp. 249.399.050

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI.S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 11 Februari 2022

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
 Pelaporan Layanan

SISKA.S.Sos., M.Si
 Pembina Tkt I

Nip. 19671107 198903 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK ERNAWATI, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 11 Februari 2022

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

TITIK ERNAWATI, SE., MM

Pembina

Nip. 19690511 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas - Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP - Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Terlaksananya Penyusunan Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan 68 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 18 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
2	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas - Terlaksananya Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 1 Laporan

KEGIATAN

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

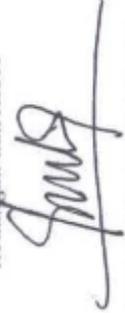
ANGGARAN

Rp. 7.707.963.788
 Rp. 7.455.000.463
 Rp. 100.800.000

KETERANGAN
 APBD

3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	17.060.975
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	77.959.375
5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	17.457.300
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	39.685.675
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp.	88.389.150
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	88.389.150
TOTAL ANGGARAN		Rp.	7.796.352.938

Palu, 11 Februari 2022
Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Asset



TITIK ERNAWATI, SE., MM

Pembina

Nip. 19690511 199003 2 007

Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE, MPWP
Jabatan : Kepala Sub Program
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

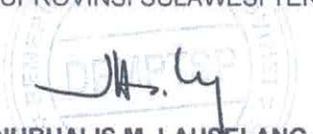
Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

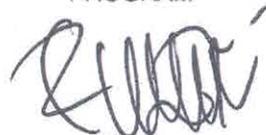
PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 13 Mei 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM


IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE, MPWP
Penata Tingkat I
Nip. 19820919 200701 1 005

LAMPIRAN PERINCIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PROGRAM
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tervujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP - Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan

KEGIATAN

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.862.875	APBD
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 131.836.600	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Rp. 54.649.650	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 47.732.375	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 53.276.700	
- Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 93.367.550	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 380.862.875	

Palu, 13 Mei 2022

Kepala Sub Bagian Program



IRWAN DWI SUKANDA, UTARA RIOEH, SE, MPWP

Penata Tingkat I

Nip. 19820919 200701 1 005

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng



NURHALIS M. LAUSELANI, S.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TASNIMA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 13 Mei 2022
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM


TASNIMA, SE

Perata Tkt. I

Nip. 19780319 200502 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan 1 Dokumen 210 Orang
2	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa - Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Laporan
3	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan 19 Unit
4	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
5	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Laporan 48 Unit 190 Unit

<p>- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</p>	<p>2 Unit</p>
---	--	---------------

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
		APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 274.111.175	
1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 168.829.625	
2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 105.281.550	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 596.095.680	
1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.993.805	
2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 125.216.250	
3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 440.885.625	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 352.671.750	
1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 352.671.750	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.465.625.815	
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 417.408.372	
2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.048.217.443	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 563.032.000	
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp. 279.950.000	
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 190.340.000	
3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 92.742.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.251.536.420	

Palu, 13 Mei 2022
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum

Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd
Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004


TASNIMA, SE
Penata Tk. I

Nip. 19780314 200502 2 003



JL. CIK DITIRO PALU NO. 29 PALU
TELP. (0451) 4017755
KODE POS 94111
<http://www.dpmtsp.sultengprov.go.id>